



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://klipping.dpr.go.id>

**Judul** : Kebakaran hutan & lahan masih terjadi, Apakah penanganannya sudah efektif?  
**Tanggal** : Rabu, 26 Agustus 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Kebakaran Hutan & Lahan Masih Terjadi Apakah Penanganannya Sudah Efektif?

Kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Petugas gabungan masih berjuang memadamkan api. Namun, bagaimana pandangan DPR dan pakar kebencanaan terkait penanganan kebakaran yang dilakukan Pemerintah saat ini?

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik pembakaran lahan secara sengaja, termasuk jika melibatkan korporasi. Dia meminta aparat penegak hukum bergerak tegas untuk mengusir setiap indikasi keterlibatan perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau, Senin (24/8/2026). Menurut Prabowo, upaya pencegahan harus dilakukan dari tingkat desa dengan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan tindakan yang dilarang.

"Kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apa pun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur

di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras," kata Prabowo, dikutip dari rilis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI).

Prabowo menekankan bahwa pendekatan pembinaan terhadap masyarakat harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang keras terhadap pihak yang dengan sengaja memicu kebakaran. Terlebih, jika pembakaran lahan diduga dilakukan atas perintah korporasi.

"Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta Polri, Kejaksaan selidiki, intelijen selidiki," tegasnya.

Prabowo menyatakan tidak akan ragu mencabut izin perusahaan apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam praktik pembakaran lahan. Ia meminta setiap laporan atau indikasi segera ditindaklanjuti oleh aparat terkait.

"Kalau ada indikasi laporan, kita segera cabut. Siapa pun, korporasi apa pun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinya," kata Prabowo.

Sementara itu, Kementerian

Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif terhadap enam perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (P6PH) setelah hasil pengawasan menemukan karhutla pada areal yang mereka kelola. Total luas areal terbakar mencapai 1.511,55 hektare yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Enam perusahaan yang dikenai sanksi terdiri atas PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat; PT NES di Kalimantan Tengah; serta PT PSR di Kalimantan Timur. Lima perusahaan dikenai sanksi berupa paksaan Pemerintah, sedangkan PT MPK dikenai sanksi pembekuan perizinan berusaha sekaligus paksaan Pemerintah karena kebakaran pada arealnya terjadi secara luas dan berulang.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan, setiap perizinan berusaha membawa tanggung jawab untuk menjaga kawasan dan mencegah terjadinya kerusakan.

"Sanksi administratif kami gunakan untuk memaksa perbaikan, pemulihan,

dan kepatuhan. Tetapi ketika ditemukan unsur pidana, proses pidana tetap berjalan," kata Januanto, Selasa (25/8/2026).

Sebelumnya, Bareskrim Polri juga telah menetapkan puluhan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan karhutla yang ditangani di sembilan Polda. Para tersangka diduga sengaja membakar lahan untuk membuka perkebunan dengan tujuan menekan biaya operasional.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Moh. Irfanmi mengatakan, penanganan perkara tersebut dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

"Jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan," kata Irfanmi, Minggu (23/8/2026).

Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno berpendapat, Pemerintah sudah melakukan penanganan yang cukup baik dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Ke depannya, lanjut politikus Partai

Amanat Nasional (PAN) ini, pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus lebih diperhatikan.

"Tidak perlu kemudian penanganannya dilaksanakan setelah kejadian kebakaran terjadi. Karena BMKG, Kementerian Kehutanan bisa mengantisipasi," ujar Eddy kepada Rakyat Merdeka, Selasa (25/8/2026).

Pakar Kebencanaan dan Geofisika dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Amien Widodo berpandangan, kebakaran membuka lahan dengan cara membakar dan faktor cuaca menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan terjadi di Indonesia saat ini.

Menurut dia, ke depannya Pemerintah harus menjaga fungsi hutan sebagai area resapan air. Dia menegaskan, harus diperhitungkan mana daerah tangkapan air dan mana daerah keluarnya air.

"Jadi, fungsi utamanya untuk meresapkan air hujan dan mengisir air tanah," tegasnya. Untuk mengetahui pandangan Eddy Soeparno dan Amien Widodo mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera, berikut wawancaranya.

AMIEN WIDODO, Pakar Kebencanaan & Geofisika dari ITS

EDDY SOEPARNO, Anggota Komisi XII DPR

## Jangan Setiap Kemarau Ada Praktik Buka Lahan Penanganan Sudah Dilakukan Dengan Baik



Bagaimana pandangan Anda dengan penanganan kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia?

Ini memang sudah sangat luas wilayah yang terbakar, ya. Baik di Kalimantan maupun Sumatera. Ada nya kebiasaan membuka hutan dan lahan untuk kebutuhan membuka lahan perkebunan. Nah, sebenarnya ini harus dibentengi dengan mematuhi musim kemarau. Jangan sampai ketika musim kemarau masih ada praktik membuka lahan seperti itu. Seharusnya ada aturan dari Pemerintah terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar. Ini harus dibuat tegas.

Menurut Anda, apa penyebab terjadinya kebakaran dan sulitnya penanganan hutan saat ini?

Pertama, faktor cuaca kemarau. El Nino, dan tidak ada awan sehingga tidak bisa membuat modifikasi cuaca. Ini menjadi pemicu kebakaran hutan. Belum lagi kebakaran yang semakin meluas dan sulit dalam memadamkannya. Awas kendala cuaca ini, tidak

ada air memang menjadi faktor utama semakin besarnya lahan yang terbakar.

Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan Pemerintah untuk memaksimalkan penanganan kebakaran hutan?

Ada upaya membuat parit. Setiap beberapa meter atau per wilayah itu harus dibuat parit sehingga ini bisa menegakkan peredaran api. Nanti diharapkan parit itu bisa diisi air dan digunakan saat kebakaran. Karena di Kalimantan atau Sumatera, ada lahan yang terbakar dan merupakan lahan gambut. Di lahan gambut ini, air hanya lewat saja. Sehingga, jika terjadi kebakaran lalu disiram air, bagian atas sudah padam, tetapi bagian bawahnya masih terbakar. Jadi, memang dibutuhkan metode khusus dalam menanganinya. Kalau dengan parit yang berisi air, diharapkan bisa membatasi penyebaran kebakaran tersebut.

Selain itu, apa lagi yang bisa dilakukan?

Saya melihat di televisi, ada rencana

pembuatan sumbu pompa air di lokasi bencana kebakaran. Sebenarnya ide ini baik saja. Tetapi, ini harus dikaji lebih baik lagi. Karena di beberapa wilayah di Kalimantan, area untuk mendapatkan air sangat sulit. Bisa sampai ratusan meter ke dalam. Sementara untuk membuat sumbu pompa air itu juga membutuhkan air. Kalau soal listrik, ya bisa dengan baterai atau panel surya. Lebih baik, jika untuk melaksanakan ide ini, Pemerintah bisa melibatkan ahli geologi atau tim dari Kementerian ESDM untuk mengetahui kondisi tanahnya.

Apa ada langkah konkret yang bisa dilakukan agar kebakaran tidak semakin meluas lagi?

Jangan buang puntung rokok dan botol air mineral. Ini berbahaya jika terkena ilalang. Puntung rokok yang masih ada bara artinya bisa membakar ilalang. Begitu juga botol air mineral yang masih berisi air jika terkena sinar matahari. Jadi, harus ada aturan yang tegas mengenai hal ini. ■ NNM



Bagaimana dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan Pemerintah saat ini?

Penanganan saat ini sudah dilakukan Pemerintah dengan baik. Saya kira di bawah kepemimpinan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menangani permasalahan karhutla ini secara *crisis management*, sehingga mendapatkan prioritas dan percepatan dalam penanganannya.

Menurut Anda, langkah apa yang seharusnya dilakukan Pemerintah dalam penanganan hutan dan lahan?

Pertama, kebakaran hutan itu adalah sebuah kejadian yang bisa diantisipasi, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara antisipatif ke depannya. Tidak perlu kemudian penanganannya dilaksanakan setelah kejadian kebakaran terjadi. Karena BMKG, Kementerian Kehutanan bisa mengantisipasi.

Konkritnya seperti apa?

Misalnya saja El Nino yang berkepanjangan, potensi kerawanan

kebakaran, ditambah lagi penanganan di lapangan untuk memahami di mana kiranya terjadi titik titik yang berpotensi menjadi hotspot. Jadi, antisipasi ini perlu ada kerja sama yang kuat antara Kementerian Kehutanan, BMKG, dan elemen Pemerintah Daerah. Kanti juga melihat bahwa penanganan karhutla ini harus lintas instansi dan lintas institusi.

Karena melibatkan berbagai pihak, baik itu dari pihak Kementerian dan lembaga yang menangani masalah hutan, BMKG, lalu Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga aparat penegak hukum.

Peran aparat penegak hukum seperti apa?

Banyak terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kebakaran hutan. Misalnya pembakaran lahan untuk kegiatan penanaman perkebunan. Jadi, penegakan hukum juga menjadi salah satu fitur yang sangat penting untuk membuat efek jera dan efek kapok bagi pelakunya. Termasuk, pelakunya itu harus ditelusuri sampai dengan

mayorannya, siapa yang menjadi pelaku dan aktor utama.

Pendekatan lain yang dapat dilakukan?

Tentu perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang penanganan dan pemeliharaan hutan. Agar masyarakat sebagai ujung tombak dari penangkalan kejadian kebakaran hutan bisa melakukan pelaporan, pemantauan, dan lain-lain.

Kebakaran hutan ini mendapat sorotan juga dari negara tetangga karena berdampak asapnya. Bagaimana itu?

Perlu juga koordinasi dari Kementerian Luar Negeri. Hal itu dilakukan agar terjadi diplomasi dengan negara-negara tetangga yang saat ini terkena dampak dari kebakaran hutan. Ini untuk menjaga hubungan baik serta bagaimana kita kemudian berkoordinasi untuk menghadapi kejadian atau potensi kejadian serupa di masa mendatang. ■ NNM